DAFTAR PUSTAKA

I. Sumber Buku

Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan, kumpulan tulisan 1965-2005*, Pustaka Alfabet, Jakarta, 2006.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Funchs C, *Social Media a Critical Introduction*, SAGE Publications, Los Angeles, 2014.

Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa, Panduan Pers, Penyiaran dan Media Siber*, Simbioasa Rekatama Media, Bandung, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

John. Locke, *Two Treatises of Government*, Ed. Peter Laslett, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet, IV*, Kencana, Jakarta, 2008.

Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.

Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2015.

Soejono Sukanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017.

Tracy L. Tuten, *Advertising 2.0: Social Media Marketing in a WEB 2.0 world*, Green Wood Publising GroupInc, USA, 2008.

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2003.

II. Sumber Jurnal / Karya Ilmiah / Makalah

Adhigama A. Budiman, dkk, Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jakarta, 2021.

Ali Alatas, dkk, Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Juducial Activism dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 4(2), 2024.

Ariany, Lisda dan Sandi Perdana, Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5(12), 2025.

Aris Sinta Sumarahat dan Andrie Irawan, Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E- Law Enforcement), *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2 (2) pp: 812—832, June, 2024.

Azzahra Jasmine Radintya, Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, *Skripsi* Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Denindah Olivia, Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Rio Law Jurnal*, Vol. 1 (2) Agustus 2020.

Denta Lasonda dkk, Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten, *Halu Oleo Law Review* Vol. 8 (2): pp. 242-257, September 2024.

Julianja, Sufiana., Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 6, 2018.

Prida Ariani Ambar Astuti, "Freedom of Expression through Social Media and the Political Participation of Young Voters: A Case Study of Elections in Jakarta, Indonesia", *SOCRATES*, Vol. 4(4), pp. 74-88, 2016.

Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7 (1) Juli 2016.

Wiranata, dkk, Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia, *Pancasakti Law Journal*, Vol 1 (2), pp. 205-218, Desember 2023.

III. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Negatif (Permenkominfo No. 19/2014).

IV. Sumber Putusan Pengadilan / Konvensi Internasional

Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Materi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 UU ITE.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

UNESCO, *Kebebasan Berekpresi dan Ketertiban Umum: Panduan Manual*, terj. Yulia F. Utami, UNESCO, Paris, 2020.

UN Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression. CCPR/C/GC/34, tersedia dalam https://docs.un.org/en/CCPR/C/GC/34, diakses pada 14 Mei 2025.

V. Sumber Surat Kabar / Tabloid / Majalah / Buletin

Kurnia Yunita Rahayu, Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, *Kompas.id* tersedia pada https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/18/kasus-bima-dan-dinamika-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial. Diakses tanggal 27 Desember 2024.

Mohammad Hatta Muarabagja, Guru Honorer di Cirebon Dipecat Usai Kritik Ridwan Kamil, Begini Kata Pakar Komunikasi Unpad, *Tempo.co* tersedia pada https://www.tempo.co/politik/guru-honorer-di-cirebon-dipecat-usai-kritik-ridwan-kamil-begini-kata-pakar-komunikasi-unpad--208207, Diakses tanggal 27 Desember 2024.

VI. Sumber Elektronik

Amnesty International, "Putusan MK jadi momentum revisi menyeluruh pasal-pasal bermasalah UU ITE", tersedia dalam https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/, diakses pada 17 Mei 2025.

_____, "Semua yang perlu kamu tahu tentang Permenkominfo 5/2020", tersedia dalam, https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/permenkominfo5-2020/08/2022/, diakses pada 20 Mei 2025.

Freedom House. (2023). Freedom on the Net 2023: Indonesia, tersedia dalam https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2023, diakses pada 18 Mei 2025.

Hasil Survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Tahun 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, tersedia dalam https://www.

komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--%24SF7YZ0Z.pdf, diakses pada 18 Mei 2025.

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, "Indonesia Membutuhkan Pengaturan Tentang Mekanisme Pemblokiran Konten Internet Yang Sesuai HAM", tersedia dalam https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/indonesia-membutuhkan-pengaturan-tentang-mekanisme-pemblokiran-konten-internet-yang-sesuai-ham/, diakses pada 18 Mei 2025.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), *Laporan Kriminalisasi Ungkapan Opini Masyarakat Sipil 2016–2020*, tersedia dalam https://safenet.or.id/publikasi/kriminalisasi-ungkapan-opini-masyarakat-sipil-2016-2020/, diakses pada 18 Mei 2025.

_____, *Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia Periode: Januari-Maret 2024*, tersedia dalam https://safenet.or.id/id/category/publikasi/laporan/, Diakses tanggal 27 Desember 2024.

_____, *Laporan Pemantauan Hak- hak Digital di Indonesia Periode: Triwulan I 2025*, tersedia dalam https://safenet.or.id/id/2025/04/laporan-pemantauan-triwulan-i-2025/, diakses tanggal 18 Mei 2025.

Pengertian Ekspresi, tersedia pada http://www.pengertianmenurut paraahli.net/pengertian-ekspresi, diakses pada 28 Desember 2024.